

**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Perikanan
(Studi Kasus Masyarakat Pesisir, Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu
Kota Bitung)**

Milyana I. Sanger¹

Jouke Lasut²

Juliana Tumiwa³

Abstrak

Inti dari penelitian ini adalah mengetahui situasi atau kondisi masyarakat pesisir di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir batu putih bawah sudah terlaksana namun belum sempurna seperti yang sudah dijelaskan, dan jika dilihat dari kehidupan masyarakat pesisir Batu Putih Bawah sudah mengalami perubahan dari sisi tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, kehidupan masyarakat yang terus berubah seiring berjalannya waktu diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat Batu Putih Bawah, masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah terlihat dari hasil tangkapan yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan hasil perikanan. Maka hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Batu Putih Bawah.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintah, Masyarakat Pesisir

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir (Satria, 2004).

Masyarakat dikawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang di peroleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sebagai negara maritim sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai nelayan. Walaupun mata pencarian orang-orang pesisir itu beragam, namun sebagian besar adalah nelayan dan kegiatan nelayan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat pesisir. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu di liputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. (Sebenan,2007)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Disisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering dicita-citakan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik di masa mendatang. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat di antaranya, masyarakat nelayan tangkap dan masyarakat nelayan pengumpul atau tibo – tibo.

Pada hakikatnya masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin, hal

ini di dasari oleh hasil tangkapan laut yang kurang maksimal serta alat tangkap ikan yang kurang memadai dan tempat perjualan atau tempat pelelangan ikan kurang menjanjikan. Kondisi itu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudian akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan.

Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan ekologi. Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa di lihat berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan di sebut “employment of the last resort” dimana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan muda diserap oleh faktor perikanan. Namun demikian manusia tidak boleh pesimis dalam memanfaatkan sektor perikanan, terutama usaha penangkapan ikan (Sastrawijaya 2002).

Kawasan pesisir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang. Perspektif pembangunan menganggap bahwa kawasan pesisir sebagai suatu satuan pengembangan tersendiri, karena memiliki ekosistem yang unik, berpotensi secara ekonomi, serta memiliki sosial budaya yang khas. Berangkat dari realitas dan penjelasan diatas, merupakan suatu hal bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mengangkat judul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Perikanan

Di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung”. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang kelurahan batu putih, batu putih adalah salah satu kelurahan di Kota Bitung yang terletak di sebelah utara Kota Bitung, penduduk yang tinggal di wilayah ini mayoritas dari suku sangir. Untuk kehidupan mereka, sebagian besar mengandalkan hasil laut yakni berprofesi sebagai nelayan. Untuk perjalanan ke batu putih dalam waktu 30 menit dari Kota Bitung dan kurang lebih dari 2 jam dari Kota Manado

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pemberdayaan

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27) istilah pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai : upaya untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan - keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Menurut Ambar (2004:77) Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar merupakan nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan sumberdaya alam

adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir isu utamanya adalah masih sangat besar jumlah masyarakatnya yang kurang mampu (penghasilan dibawah standar rata-rata yang ditentukan) dan masih harus menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air bersih, abrasi, dan sulitnya mencapai tingkat pendidikan yang layak, hal ini disebabkan belum di kelola dengan baik.

Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak mneyemarakatkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Menurut Ginanjar kartasmita dalam Bagong (2001:25) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara :

- A. Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu di berdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- B. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat di akses oleh masyarakat lapisan bawah

C. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat

Teori Fungsionalisme Struktural

Skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Perikanan Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcot Parsons.

Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcot parsons. Talcot Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Talcot parsons merupakan tokoh yang mendominasi Teori sosial sejak perang dunia kedua sampai pertengahan 1960-an. Menurut Talcot Parsons Teori Fungsionalisme Struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dibangun Talcot Parsons dan di pengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya

karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengidahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Prinsip-prinsip pemikiran menurut Talcot Parsons, “tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan” (George Ritzer 2012). Secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi dan norma.

Teori Fungsionalisme Struktural meyakini bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan upaya masyarakat guna mencapai keseimbangan atau kestabilan baru. Dalam berbagai kondisi, masyarakat berupaya beradaptasi dan menyusun kembali dirinya hingga menemukan keseimbangan baru yang lebih mantap. Merton dalam George Ritzer mendefinisikan fungsi sebagai berikut : Fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Robert K. Merton juga menyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku dapat bersifat fungsional dan dapat pula bersifat disfungsional. Konsekuensi tersebut dapat mengarah kepada integrasi dan keseimbangan yang bersifat fungsional namun dapat juga bersifat disfungsional yang akan memperlemah integrasi

Metode Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai alamiah. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu; penarikan informan yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Informan tersebut yaitu, kepala kelurahan dan 7 masyarakat pesisir

Pembahasan

Hasil Wawancara

1. Informan B.M (Lurah)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai ibu B.M pekerjaan lurah. Pemberdayaan yang ada di batu putih sangat perlu dalam meningkatkan perekonomian, program masyarakat untuk batu putih bawah itu melekat pada pemerintah kota. Untuk tahun ini di karena covid jadi di berikan program pusat berupa UMKM. Tetapi untuk pemberdayaan masyarakat yang ada disini sudah bisa di katakan berdaya sendiri, adapun dari pemerintah kota dan juga ada dari kelurahan memberikan pelatihan – pelatihan tertentu guna mengembangkan minat maupun skill sekaligus memotivasi masyarakat yang nantinya akan menjalankan program UMKM tersebut. Jika terdapat dana kelurahan yang dapat menunjang keberlangsungan program tersebut, maka hal paling konkrit yang pernah dilaksanakan ialah pemberdayaan warga dengan memproduksi bakso ikan. Namun pada kenyataan yang ada seringkali terjadi kelemahan dalam pemberdayaan. Misalnya saja gairah masyarakat di awal proses pemberdayaan sangat menggebu – gebu, tetapi seiring berjalannya waktu ketika terjadi suatu kendala seperti modal usaha yang terbatas dalam proses

pemberdayaan tersebut , masyarakat seringkali di perhadapkan dengan situasi putus asa yang berdampak pada terbengkalainya pelaksanaan program UMKM.

2. Informan Y.G (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai bapak Y.G sebagai masyarakat pesisir. Menurut Narasumber pemerintah sudah melaksanakan pemberdayaan di kelurahan Batu putih bawah dalam membentuk kelompok nelayan namun pada kenyataannya yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal juga belum tepat sasaran, ketidaktepat sasaran ini bukan karena tidak ada alasan contohnya saja bantuan seperti perahu motor yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kelompok nelayan yang ingin memulai suatu usaha akan tetapi diberikan kepada nelayan-nelayan yang sudah terlebih dahulu memulai usaha tersebut. Begitu pun bila menyinggung mengenai perekonomian dan pendidikan di kelurahan batu putih bawah, hingga sampai saat ini keresahan terbesar yang terjadi pada kehidupan masyarakat ialah aliran-aliran dana yang diprioritaskan untuk masyarakat kecil seringkali diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki kelebihan financial. Dan juga masyarakat di kelurahan batu putih bawah merasa pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pesisir masih belum terlaksana secara optimal dan masih banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah setempat walaupun secara garis besar pemerintah sudah melakukan beberapa hal konkrit yang dilaksanakan seperti drainase (saluran air).

3. Informan E.L (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai bapak E.L sebagai masyarakat pesisir. Menurut Narasumber pemerintah setempat sudah lama melakukan pemberdayaan untuk masyarakat kelurahan batu putih bawah,

keterlibatan masyarakat setempat dalam usaha pariwisata Taman Wisata Alam Batuputih. Khususnya jasa rumah inap (homestay) yang tersedia di sekitar kawasan Taman Wisata Alam. Masyarakat kelurahan batu putih bawah juga sering mendapat bantuan berupa beras raskin di setiap periode berjalan, dan pemerintah setempat ikut turun langsung dalam memberikan fasilitas terhadap kami masyarakat pesisir contohnya saja melaksanakan bedah rumah kepada masyarakat yang terkena musibah maupun dampak dari bencana alam. Kami juga masyarakat pesisir merasakan langsung program pendidikan yang dilaksanakan di kelurahan ini seperti kami anak putus sekolah dan diikutsertakan dalam program paket c. Tidak sampai disitu saja kami masyarakat pesisir mendapat suplai bantuan ekonomi dari pemerintah dengan memberikan bantuan melalui dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelayanan pemerintah yang kami rasakan sudah terlaksana dengan baik sampai sejauh ini ialah dengan pembuatan surat-surat dan dokumen yang tidak dipungut biaya (pungli), dan pemberdayaan untuk masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh pemerintah menurut saya sudah sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang ada di kelurahan batu putih bawah.

4. Informan Y.M (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai ibu Y.L sebagai masyarakat pesisir. Menurut Narasumber, pemerintah melalui Lembaga Konservasi Kelurahan batuputih bawah berupaya memperluas keterlibatan warga dalam sektor pariwisata. Langkah menuju kesana telah dimulai dengan pelatihan kuliner, dalam kegiatan pelatihan kuliner tersebut kami dilatih membuat mocktail, bakso, salad buah, burger hingga pengetahuan terkait sanitasinya. Untuk memotivasi warga sekitar pemerintah rencananya akan

membuat food court bagi kami masyarakat pesisir dan untuk mengembangkan usaha alternatif tersebut kami dibentuk dalam suatu kelompok-kelompok yang nantinya menjalankan usaha tadi dan menunjang pariwisata lokal. Pemerintah setempat juga memberikan kami masyarakat pesisir fasilitas-fasilitas seperti pembangunan jalan paving dan wc umum di kelurahan batu putih bawah. Adapaun program pemerintah dalam sektor pendidikan di kelurahan batuputih bawah ini yang kami ketahui adalah seperti mengikutsertakan masyarakat pendidikan putus sekolah dan menjalankan program paket A,B,C. Kondisi perekonomian kami masyarakat pesisir dapat dikatakan naik turun namun dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha tersebut kami merasa sangat terbantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mensejahterakan kehidupan keluarga. Kami masyarakat pesisir merasa pelayanan publik sudah berlangsung dengan baik contoh konkritnya pembuatan surat-surat dicapil sudah dipermudah dan sekarang sudah dibuat lewat kelurahan. Dan juga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan potensi masyarakat pesisir.

5. Informan J.T (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai ibu Y.L sebagai masyarakat pesisir. Menurut narasumber, pemerintah melalui Lembaga Konservasi Kelurahan (LKK) batuputih bawah bukan cuma mengembangkan potensi di bidang wisata dan kulinernya saja akan tetapi melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok pengrajin cinderamata sehingga masyarakat kelurahan batu putih bawah mempunyai peluang usaha baru dan pendapatan alternatif. Pemerintah setempat khususnya kelurahan batu putih bawah

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan salah satu contoh konkritnya ialah pembuatan tanggul di tepi pantai yang berfungsi untuk mencegah banjir di dekat pemukiman masyarakat pesisir. Walaupun tidak semua fasilitas yang diberikan kepada kami masyarakat pesisir masih kurang memadai. Dan juga kami masyarakat pesisir merasa program perekonomian di kelurahan batuputih bawah hanya diperuntukan untuk sebagian orang saja dalam artian hanya mereka yang memiliki kenalan ataupun keluarga dekat dengan pemerintah. Akan tetapi tak dapat dipungkiri lagi bahwa pemberdayaan maupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat memang sedikit membantu kami masyarakat pesisir walau terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, namun kesalahan - kesalahan kecil yang sering terjadi dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan batu putih bawah ialah tidak sinkronnya sumber daya manusianya dalam mengembangkan setiap potensi sumber daya alam yang ada di kelurahan batuputih bawah.

6. Informan V.W (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai bapak V.W sebagai masyarakat pesisir yang merasakan dampak pemanfaatan dari kawasan konservasi. Narasumber sendiri tergabung dalam kelompok masyarakat pemberdayaan cagar Taman Wisata Alam batuputih. Memang benar kami sebagai masyarakat pesisir merasakan langsung bagaimana peningkatan ekonomi yang berasal dari kawasan konservasi Taman Wisata Alam apalagi di saat musim liburan, tak hanya itu saja kami sebagai guide merasa sangat dihargai dan diakui dengan adanya pengakuan secara legal dari pemerintah setempat yang tak lain adalah surat keputusan dari desa. Sebagai masyarakat pesisir biasanya kami terkendala dalam keperluan kehidupan kami sehari-hari

akan tetapi pemerintah setempat memberikan bantuan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut contoh kecilnya saja di kelurahan batuputih bawah telah dibangun fasilitas wc umum dan pembuatan sumur di rumah warga setempat . Kami juga masyarakat pesisir sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah kota Bitung dalam membangun 1000 titik wifi salah satu titiknya berada di kelurahan batuputih bawah sehingga membantu kemajuan pendidikan dan sarana kemajuan informasi untuk kami masyarakat pesisir. Kami sebagai masyarakat pesisir sudah cukup puas dengan pemerintah setempat dalam melakukan pelayanan publik karena sampai sejauh ini sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari kami sebagai masyarakat pesisir yang secara umum sumber daya manusia di kelurahan batu putih bawah yang masih rendah .

7. Informan B.A (Masyarakat Pesisir)

Pada kesempatan ini penulis mewawancarai bapak B.A sebagai masyarakat pesisir. Menurut narasumber, pemerintah setempat telah melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan membentuk kelompok usaha ekonomi kreatif terlebih khusus di bidang pasar. Kami sebagai masyarakat pesisir juga merasa fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah di kelurahan batuputih bawah sampai sejauh ini sangatlah membantu untuk kemajuan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari contoh konkritnya saja seperti akses pelebaran jalan , pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembangunan wc umum. Kami masyarakat kelurahan batuputih bawah juga mengapresiasi pemerintah dan juga pertamina yang sudah membuat terobosan baru di pemukiman kami, terobosan tersebut tak lain ialah menghadirkan pertashop. Pertashop adalah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen

BBM non subsidi, LPG non subsidi, dengan adanya hal tersebut membantu pula rekan-rekan nelayan untuk mencari bahan bakar dalam pengoperasian kapal motor. Kami pun masyarakat pesisir merasa puas dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat terlebih dalam pengurusan surat-surat maupun dokumen penting yang tidak ada biayanya ataupun pungutan-pungutan liar.

Rangkuman Hasil Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi atau kondisi masyarakat pesisir di kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan berdasarkan hasil wawancara dari 7 informan penelitian melalui hasil observasi dan dokumentasi maka pemberdayaan yang ada di batu putih sangat perlu dalam meningkatkan perekonomian, pendidikan dan fasilitas – fasilitas umum. Program yang ditawarkan untuk masyarakat batu putih bawah itu melekat pada andil pemerintah kota demi kelangsungan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di kelurahan batu putih bawah sudah bisa di katakan berdaya sendiri, adapun dari pemerintah kota maupun kelurahan memberikan pelatihan – pelatihan tertentu guna mengembangkan minat maupun skill dari masyarakat pesisir serta memotivasi masyarakat yang nantinya akan menjalankan program UMKM seperti food court, kelompok nelayan kecil dan program kesenian untuk para seniman begitu pula dengan pengelolaan taman wisata alam batu putih yang sebagian besarnya dikelola oleh masyarakat pesisir. Adapun beberapa contoh fasilitas umum yang di berikan oleh pemerintah setempat untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir seperti pembuatan tanggul di tepi pantai, pelebaran akses jalan di kelurahan batu putih bawah, pembangunan wc umum, pemasangan lampu jalan, memasang 1000 titik wifi di kota bitung yang salah satu

titiknya berada di kantor kelurahan batu putih bawah guna menunjang pembelajaran daring, pembangunan kembali rumah yang ambruk karena terkena musibah bencana alam, pembuatan saluran – saluran untuk kelurahan batu putih bawah, dan bekerja sama dengan pertamina untuk menghadirkan pertashop di kelurahan batu putih bawah yang memudahkan para nelayan untuk mencari bahan bakar dalam pengoperasian kapal motor.

Akan tetapi fasilitas-fasilitas umum dan pelayanan publik yang diberikan maupun ditawarkan pemerintah kepada masyarakat pesisir belum semua memadai dan tidak semua masyarakat pesisir dapat merasakan maupun menggunakan fasilitas umum tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa kesehatan adalah unsur kehidupan yang tidak dapat kita kesampingkan sehingga kehadiran para tenaga medis di kelurahan batu putih bawah menjadi contoh kecil dari titik balik kelurahan batuputih bawah dan pemerintah kota untuk lebih baik lagi dalam segi pelayanan publik. Yang paling sering dijumpai pada kehidupan masyarakat pesisir di kelurahan batuputih bawah ialah belum efektifnya penggunaan sarana prasarana fasilitas umum yang hanya diperuntukan untuk sebagian orang saja dalam artian mereka yang memiliki kenalan ataupun keluarga dekat dengan pemerintah (masih kentalnya tradisi KKN). Contoh kecilnya saja ialah seperti aliran-aliran dana bantuan yang diprioritaskan untuk masyarakat kecil seringkali menyimpang dan diberikan kepada masyarakat yang memiliki kelebihan financial.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dapat digambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di kelurahan Batu Putih Bawah sudah terlaksana namun belum sempurna seperti yang sudah dijelaskan di atas bagaimana pemberdayaan yang ada di Kelurahan Batu Putih Bawah, dan jika di lihat dari kehidupan masyarakat pesisir Batu Putih Bawah sudah mengalami perubahan dari sisi tatanan

kehidupan masyarakat itu sendiri, kehidupan masyarakat yang terus berubah seiring berjalannya waktu diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Penting mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat pesisir demi mengatasi masalah berskala kecil maupun besar yang dirasakan oleh masyarakat pesisir itu sendiri, yakni kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan, dan keterasingan. Sebagaimana sering disebutkan, hal tersebut merupakan hal yang ironis karena justru terjadi pada masyarakat yang bekerja di dalam sumber daya yang melimpah. Untuk itu penting untuk pemerintah mengembangkan kembali program Pengembangan Ekonomi Pesisir (PEMP) dengan prinsip *to help them to help themselves*.

Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumber daya laut dan daerah pesisir secara berkelanjutan, memang tidak ada jalan lain selain mengeluarkan masyarakat pesisir dari perangkap keterbelakangan. Dan tak sampai disitu pula dari sisi pemerintah itu sendiri telah memberlakukan program kelompok usaha kecil demi progres kemajuan ekonomi masyarakat pesisir Kelurahan Batu Putih Bawah.

Akan tetapi fasilitas-fasilitas umum dan pelayanan publik yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat batu putih bawah belum semua memadai atau semua masyarakat batu putih bawah belum mampu menggunakan fasilitas tersebut contohnya pemerintah telah memberikan akses internet secara gratis namun masih belum semua masyarakat batu putih bawah menggunakan gawai (Android) namun ada juga pelayanan publik yang di berikan dari pemerintah membantu efektivitas pemberdayaan batu putih bawah seperti pembuatan tanggul di tepi pantai, pelebaran akses jalan di kelurahan batu putih bawah, pembangunan wc umum, pemasangan lampu jalan, pengadaan pertashop dan pembangunan

kembali rumah yang ambruk oleh pemerintah. dari pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat batu putih bawah ini, masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan dari pemerintah terlihat dari hasil tangkapan yang di peroleh. Hal ini dapat di artikan bahwa adanya efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan hasil perikanan.

Penutup

Kesimpulan

Masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir Batu Putih Bawah dalam meningkatkan pendapatan hasil perikanan. Maka hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat batu putih bawah terlihat dari hasil tangkapan masyarakat yang meningkat.

Saran

Saran bagi Kelurahan Batu Putih Bawah harus memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat pesisir agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi dari sumber daya alam yang terdapat di kelurahan ini. dan harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam mengembangkan program serta melanjutkan program pemberdayaan yang sudah di berikan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Gava Media
- George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 178.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiat. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta Cv
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Asia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sastrawijaya. 2002, keragaan pembangunan perikanan tangkap: *Suatu analisis prorgam pemberdayaan nelayan kecil*, Institut pertanian bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sebenan, R.D 2007. Strategi pemberdayaan rumah tangga nelayan di Desa Gangga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Retika Adhitama
- Suyanto, Bagong. 2001. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Masyarakat Kebudayaan dan Politik*.
- Satria, A. (2004). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cisendo.
- Sumitro, Joyohadikusumo (1957). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sobri, 1999, *Ekonomi Internasional*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Jogjakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zulfan. Nahrudin. “*Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Hasil Perikanan Dikelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru*”. Skripsi, fakultas ilmu sosial dan politik universitas hasanudin makassar, 2014.
- Zunadi, Muhamad. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. [Http://www.rumahzakat.org/](http://www.rumahzakat.org/). Diakses 10 Februari 2014